

# POLICY PAPER

Isu-Isu Strategis Jangka  
Menengah Kabupaten  
Sidoarjo: Mewujudkan  
Pembangunan  
Berkelanjutan dan  
Kemandirian Lokal

**Oleh:**

Lailul Mursyidah, M.AP



# LETTER OF TRANSMITTAL



Paper ini dirancang untuk menjawab kebutuhan pembangunan masyarakat yang kompleks dan komprehensif, yang mencakup aspek sosial, ekonomi, budaya, dan politik. Dalam penyusunan dokumen ini, kami telah mempertimbangkan isu-isu strategis nasional dan daerah yang relevan dengan Kabupaten Sidoarjo. Permasalahan tersebut antara lain perubahan iklim, krisis energi dan air, ketahanan pangan, kemiskinan, kemajuan teknologi, perluasan wilayah, permasalahan perbatasan, dan tren perekonomian global. Faktor-faktor ini sangat penting dalam membentuk agenda pembangunan di Kabupaten Sidoarjo dan memastikan bahwa rencana tersebut selaras dengan prioritas nasional dan daerah.

## Ringkasan Eksekutif



Pembangunan merupakan proses perbaikan yang terus menerus menuju kehidupan yang lebih baik atau lebih manusiawi. Di Indonesia, pembangunan nasional dilakukan oleh semua komponen bangsa untuk mencapai tujuan negara. Sistem perencanaan pembangunan nasional menghasilkan rencana pembangunan jangka panjang, jangka menengah, dan laporan tahunan di tingkat nasional dan lokal. Pembangunan di Kabupaten Sidoarjo harus dilakukan secara menyeluruh dan komprehensif, mengacu pada isu-isu strategis nasional dan regional. Identifikasi isu-isu strategis ini merupakan peluang dan tantangan dalam pencapaian target pembangunan di Kabupaten Sidoarjo.



# Latar Belakang

Ketercapaian pembangunan yang berkualitas pada tingkat nasional maupun daerah ditentukan oleh efektifitas dan efisiensi sebuah perencanaan pembangunan dalam menyelesaikan permasalahan berdasarkan isu-isu strategis yang berkembang pada masyarakat. Isu tersebut berasal dari faktor internal maupun eksternal yang mencakup wilayah internasional, nasional, maupun regional/daerah. Isu yang bersumber dari faktor eksternal adalah perkembangan ekonomi dunia, perubahan iklim dunia serta pertahanan dan keamanan dunia.

Perencanaan pembangunan jangka menengah di Kabupaten Sidoarjo tidak dapat dilepaskan dari isu-isu strategis nasional dan regional. Identifikasi masing-masing isu tersebut merupakan peluang dan tantangan dalam pencapaian target pembangunan. Beberapa isu strategis Kabupaten Sidoarjo dalam perencanaan pembangunan meliputi perubahan iklim, krisis energi dan air, ketahanan pangan, kemiskinan, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, pemekaran wilayah, perbatasan wilayah, dan ekonomi global

Kajian isu-isu strategis dalam RPJMD Kabupaten Sidoarjo mengacu pada Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2016-2020, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Timur Tahun 2014 – 2019, serta Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2006-2015. Isu-isu strategis tersebut dapat menjadi acuan dan pedoman dalam menghadapi berbagai tantangan dan permasalahan yang diselesaikan dalam pembangunan daerah guna mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui pelayanan yang berkualitas khususnya di Kabupaten Sidoarjo.

## Tujuan

Tujuan paper ini diharapkan dapat membantu Kabupaten Sidoarjo dalam menghadapi berbagai isu strategis yang berpengaruh pada pembangunannya.

# Situasi Permasalahan

Pertumbuhan lembaga penggerak ekonomi masyarakat koperasi yang berstatus aktif relatif rendah yaitu 8 unit (0,27%) di tahun 2014. Pertumbuhan lembaga penggerak ekonomi masyarakat koperasi yang berstatus aktif di tahun 2014 belum mencapai target RPJMD. Pertumbuhan yang belum signifikan di tahun 2014 pada kekayaan Badan Kredit Desa (2,74%). Realisasi jumlah investasi penanam modal dalam negeri fasilitas di Kabupaten Sidoarjo tahun 2014 menurun 30,93%. Belum optimalnya manajemen pengelolaan lembaga keuangan lokal. Jumlah kunjungan wisata pada tahun 2014 (13.086 orang) belum mengalami peningkatan yang signifikan dibandingkan pada tahun 2013 (880.447 orang). Kurangnya promosi yang terintegratif dan pencitraan objek daerah tujuan wisata. Rendahnya infrastruktur dalam sektor pariwisata. Kurangnya koordinasi di antara stakeholder yang terlibat dalam pengembangan pariwisata. Kurangnya kerjasama dengan agen wisata dan lembaga pendidikan dalam sektor pariwisata. Perusahaan yang melakukan wajib lapor terkait dengan pelaporan standar pengupahan yang sesuai dengan upah minimum regional (UMR) masih rendah. Tingkat pengangguran terbuka pada tahun 2014 sebanyak 4,2%. Hubungan industri dalam penyelesaian perselisihan masih rendah. Penindakan terhadap kasus pelanggaran ketenagakerjaan masih rendah. Jaminan kesehatan tenaga belum secara keseluruhan diberikan oleh perusahaan yang terdaftar di instansi terkait. Pertumbuhan jumlah industri masih rendah. Pertumbuhan industri yang memiliki ijin masih rendah. Menurunnya ekspor non-migas. Pertumbuhan jumlah pelaku usaha perdagangan masih rendah. Penyediaan sarana dan prasarana sektor perdagangan khususnya di pasar masih rendah. 121 orang belum menempati posisi jabatan struktural. Terbatasnya pegawai yang memenuhi kualifikasi dan kompetensi. Sumber daya aparatur secara kuantitas tinggi namun secara kualitas masih rendah. Pelaksanaan diklat bimbingan dan teknis menurun. Kualitas sumber daya aparatur desa yang masih kurang memadai. Pengelolaan manajemen pemerintahan desa yang belum optimal. Kurangnya pemerataan infrastruktur dan pemerataan investasi potensi daerah. Masih rendahnya sistem penanganan sanitasi yang didukung oleh sarana prasarana yang handal. Masih banyaknya MCK yang belum memadai (di tepi sungai) dan masih banyaknya limbah domestik yang dibuang ke sungai. Terdapat kawasan lindung geologi (semburan lumpur Lapindo), rawan terhadap amblesan tanah dan banjir lumpur maupun air. Jalan rusak dan tidak beraspal yang tidak segera ditangani. Angka Putus Sekolah rata-rata masih relatif tinggi, yaitu 10,23 tahun (2014). Masih adanya buta huruf sebesar 2,09% di usia 15 tahun ke atas. Kualitas pendidikan yang belum merata dan masih terkonsentrasi di perkotaan. Angka Partisipasi Kasar (APK) Pendidikan Menengah Atas (SMA/SMK/MA) masih belum memenuhi target nasional (85,00), yaitu sebesar 84,65. Masih kurangnya guru untuk jenjang pendidikan dasar (SD/MI). Masih adanya penurunan kualitas bangunan sekolah untuk jenjang pendidikan SD dan SLTP. Belum terpenuhinya rasio jumlah kelas terhadap murid di tiap jenjang pendidikan. Belum optimalnya pen-dataan dan pendidikan anak berkebutuhan khusus (ABK) usia sekolah.

# Situasi Permasalahan

Angka Partisipasi Pendidikan Tinggi masih rendah. Relevansi pendidikan menengah dengan dunia kerja yang masih rendah. Apresiasi kesehatan masih rendah, utamanya bagi masyarakat miskin. Tingginya angka kematian yang disebabkan oleh penyakit menular ataupun faktor ketidaktahuan menyikapi kesehatan. Masih adanya angka kematian ibu (AKI) dan (AKB) akibat masalah gizi selama kehamilan. Masih kurangnya mutu fasilitas pelayanan kesehatan, ketersediaan obat dan perbekalan kesehatan, tenaga kesehatan, pembiayaan dan manajemen kesehatan. Ancaman penyakit menular maupun penyakit yang tidak menular masih terjadi. Masih rendahnya keterlibatan perempuan dalam proses pembangunan. Masih rendahnya kedudukan dan peranan perempuan di sebagian bidang kehidupan dan pembangunan yang mengakibatkan ketimpangan gender. Masih adanya warga masyarakat yang tidak tertib dalam menjalankan agamanya. Program pembangunan yang kurang responsive gender. Kurangnya toleransi kehidupan beragama dalam masyarakat. Adanya kecenderungan menurunnya partisipasi politik masyarakat. Kerjasama antara pemerintah, organisasi politik, organisasi masyarakat dan LSM masih berjalan parsial. Masih adanya keterbatasan sumberdaya di bidang pembinaan dan perlindungan masyarakat. Besarnya tuntutan masyarakat pada pemerintah dalam bentuk demonstrasi. Belum dinamisnya aspirasi masyarakat dalam partai. Masih adanya perilaku anarki dan pelanggaran hukum di masyarakat. Kecenderungan meningkatnya angka kriminalitas dan kenakalan remaja sebagai dampak dari masalah ekonomi maupun globalisasi informasi. Gangguan keamanan dan ketertiban meningkat. Sarana dan prasarana keamanan dan ketertiban kurang memadai. Keterlibatan aparat kurang memadai. Jumlah penduduk yang mempunyai KTP tahun 2014 sebesar 66,9% dari jumlah penduduk yang wajib ber-KTP. Jumlah penduduk yang terekam E-KTP sebesar 76,59% dari jumlah penduduk yang wajib ber-E-KTP. Jumlah penduduk yang mengurus akte kelahiran menurun sebesar 1,55%. Tahun 2014, jumlah pelayanan akte pencatatan sipil. Jumlah media komunikasi dari tahun 2005 sampai dengan 2014, sebanyak 1 buah yaitu Kelompok Informasi Masyarakat (KIM). Tahun 2014, telah diadakan 6 kali kegiatan KIM di kecamatan dari 18 kecamatan. Laporan SPM belum menjelaskan capaiannya. Belum maksimalnya kepemilikan ijin perusahaan yang telah terdaftar, yaitu hanya 75,65% dari 44.800 perusahaan. Penyediaan SPM berbasis IT belum keseluruhan tersedia pada masing-masing SKPD. Indeks kepuasan masyarakat. 81,8% dari 11 sungai di Sidoarjo tercemar limbah BOD, DO dan detergen. Tahun 2014, jumlah produksi sampah sebanyak 4517 m<sup>3</sup>/hari dengan prosentase jumlah sampah terangkut sebesar 20,46%. Pemenuhan ruang terbuka hijau baru mencapai 59,07% dari target 27 hektar. Rendahnya kesadaran. Belum semua rencana rinci RDTR baru ada 14 Kecamatan (kurang 4 Kecamatan). Belum tersusunnya rencana rinci dan rencana kawasan strategis secara keseluruhan. Jumlah kendaraan di Kabupaten Sidoarjo yang lulus uji kelayakan mengalami penurunan 75,34% dari 77,8% tahun 2013. Tidak menambah jumlah traffic light, terminal dan dermaga. Realisasi ijin perpanjangan. Pembangunan jalan lingkungan mengalami penurunan sebesar 12,755 meter. Meningkatnya jumlah kejadian kebakaran yang disebabkan: kurangnya kesadaran dan pemahaman masyarakat terhadap upaya pencegahan.

# Analisis Alternatif

1. Meningkatkan dukungan pemerintah dan fasilitasi untuk lembaga penggerak ekonomi masyarakat koperasi.
2. Meningkatkan promosi dan pencitraan objek wisata.
3. Meningkatkan dukungan pemerintah dan fasilitasi untuk investasi penanam modal dalam negeri.
4. Meningkatkan kerjasama dengan agen wisata dan lembaga pendidikan dalam sektor pariwisata.
5. Meningkatkan program pembangunan yang responsive gender.
6. Meningkatkan promosi dan pencitraan objek wisata.
7. Meningkatkan dukungan pemerintah dan fasilitasi untuk penyelesaian perselisihan industri.
8. Meningkatkan kerjasama dengan agen wisata dan lembaga pendidikan dalam sektor pariwisata.

# Konsekuensi Alternatif

1. Peningkatan partisipasi masyarakat dalam ekonomi lokal dan kualitas hidup melalui akses keuangan.
2. Peningkatan jumlah investasi penanam modal dalam negeri, kualitas hidup melalui pekerjaan yang dihasilkan.
3. Peningkatan keterlibatan perempuan dalam proses pembangunan.
4. Peningkatan efisiensi dalam penyelesaian perselisihan industri.

# Rekomendasi



## Rekomendasi

1. Pendidikan: Angka putus sekolah tinggi, kualitas dan kuantitas pendidikan belum optimal, serta kurangnya tenaga pengajar/guru Sekolah Dasar (SD).
2. Kesehatan: Tingginya tingkat penyakit HIV/AIDS, pembiayaan kesehatan yang tidak berpihak kepada rakyat kurang mampu.
3. Ketahanan Pangan: Kebutuhan konsumsi pangan meningkat, ketersediaan pangan membutuhkan pasokan dari luar daerah.
4. Infrastruktur dan Permukiman: Wilayah perkumuhan meluas, peningkatan sarana transportasi, tingginya arus kemacetan, dan kurangnya pemahaman masyarakat terhadap upaya pencegahan kebakaran.
5. Ekonomi, Industri, dan Perdagangan: Pertumbuhan koperasi rendah, sektor industri dan perdagangan belum berkembang pesat, dan realisasi nilai ekspor non-migas menurun.
6. Ketenagakerjaan: Penyerapan tenaga kerja sektor industri stagnan, jumlah angkatan kerja tidak meningkat, dan tingkat pengangguran terbuka 4,2%.
7. Reformasi Birokrasi: Sumber daya aparatur tinggi namun kualitas rendah, pengelolaan manajemen pemerintahan desa belum optimal, dan menurunnya partisipasi politik masyarakat.
8. Lingkungan Hidup: Dampak pemanasan global, kurangnya respon terhadap isu-isu lingkungan global, serta pemanfaatan dan pengendalian ruang yang belum optimal.
9. Pariwisata: Jumlah kunjungan wisata belum berkembang pesat, pengolahan potensi objek wisata belum optimal, dan kurangnya promosi objek wisata.
10. Pemberdayaan Sosial: Rendahnya kedudukan perempuan dalam pembangunan dan kurangnya responsifitas program pembangunan terhadap gender.